



# **PERAN DINAS KESEHATAN KAB/KOTA DALAM PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN DI DAERAH**

Oleh:

Dinas Kesehatan Kota Surakarta

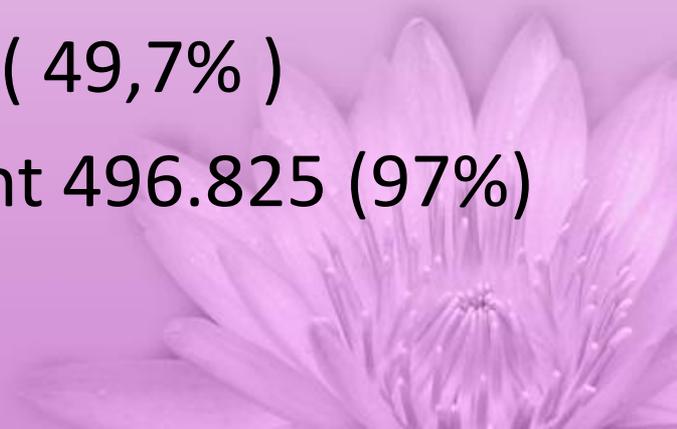


# JAMINAN KESEHATAN DI KOTA SURAKARTA

- BPJS
- JAMKESDA , dengan nama PKMS (Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta).
  - PKMS gold, untuk maskin yg blm msk jamkesmas
  - PKMS silver



# PKMS

- Kepesertaan semua penduduk, yang belum mempunyai jaminan kesehatan (jamkesmas, ASKES PNS, Asabri, Jamsostek dan Askes sosial lainnya )
  - Mulai thn 2008.
  - Tidak ada bayar iuran, kepesertaan aktif
  - Ada verifikasi lapangan untuk yg gold
  - Gold = 25.463     Silver= 227.342 ( 49,7% )
  - Penduduk yg punya jamianan ksht 496.825 (97%)
- 

# PERANAN DINAS KESEHATAN

REGULATOR DI DAERAH

PENYEDIA FASKES PRIMER:

SKPD DINAS KESEHATAN

UPT DINAS



# PERSIAPAN PELAKSANAAN JKN

- Inventarisasi faskes ( primer termasuk kebidanan, rujukan )
- Advokasi ke pimpinan, DPRD, SKPD terkait
- Sosialisasi ( masyarakat, organisasi profesi, TOMA, TOGA, termasuk PLKB, dll )
- Penataan SDM di UPT Puskesmas
- Penertiban perijinan kesehatan terutama di Puskesmas
- Pemenuhan Sarana prasarana
- Standarisasi pelayanan



# PELAKSANAAN

- PBI : Puskesmas
- Askes PNS: kl 70 % di Puskesmas
- Jamsostek : dokter praktek dan klinik



# PERMASALAHAN YANG ADA

- Pemahaman tentang aturan di anggota profesi masih kurang
- Munculnya kekhawatiran2 yg harusnya tidak terjadi
- Peraturan thd pelayanan kebidanan berubah (non kapitasi/kapitasi )
- Pemahaman Stakeholders KB msh kurang terhadap kebijakan pelayanan KB



# PERMASALAHAN YANG ADA

- Keluhan masyarakat terhadap pelayanan baik di PPK primer dan rujukan ( rujukan berjenjang dan mappping)



# UPAYA YANG DILAKUKAN

- Koordinasi intensif dg BPJS kesehatan
  - Komunikasi intensif dengan PPK I dan rujukan terhadap permasalahan yang ada
  - Evaluasi secara berkala
  - Koordinasi intensif dg organisasi profesi
  - Koordinasi dg stakeholders yang menangani KB , terhadap kebijakan yg ada.
  - Penilaian faskes BPM , dg keterlibatan IBI.
- 

- Permasalahan yang ada , BPJS memberi tembusan ke Dinas,
- Permasalahanan yg masuk ke Dinas, segera di komunikasikan dg faskes, dan BPJS.



# KENDALA (1 )

- SDM kesehatan kurang ( regulasi yang ada: moratorium?, kontrak? )
  - Masyarakat kurang siap terhadap mapping, rujukan berjenjang dan mekanisme pelayanan ( obat ) terutama eks Askes PNS.
  - Untuk pasien Jamkesda , eks Jamkesmas agak siap terhadap kebijakan JKN ( rujukan berjenjang, formularium)
  - Simpus Puskesmas belum bisa sinergi dg laporan BPJS
- 

## KENDALA (2)

- Pelayanan yg diberikan dalam kapitasi ( ANC, PNC, KB, Immunisasi ).. DAMPAKNYA TERHADAP PROGRAM.



# KUNCI

- KOMUNIKASI , KOORDINASI dalam menyelesaikan setiap permasalahan.
- Semua harus mempunyai pemahaman :  
SUKSES UNIVERSAL COVERAGE TAHUN 2019
- Hindari rasa “ dirugikan”
- EVALUASI secara berkala dg seluruh elemen yg terlibat dalam pelaksanaan JKN



**SEKIAN**



**TERIMA KASIH**

**DINAS KESEHATAN KOTA SURAKARTA**